

Menilai Kualitas Ruang Publik untuk Pariwisata Berkelanjutan di Kota Sabang

*Fachrurrazi¹, Nabilah²

¹Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

²Universitas Syiah Kuala

Email: fachrurrazi.y@gmail.com

Abstract

Sabang City recognized as a national strategic tourism area and cruise port in western Indonesia, has significant potential to develop inclusive and sustainable tourism. However, the current condition of its public spaces remains suboptimal. This study aims to assess the quality of public spaces in Sabang based solely on field observations using ten sustainability-based indicators derived from a literature review: accessibility, safety and comfort, cleanliness and maintenance, visual appeal, diversity of functions and facilities, sociocultural value, visitor behavior patterns, economic integration, stakeholder collaboration, and environmental awareness. Field observations were conducted across seven public space locations from December 2 to 14, 2024. The findings reveal that collaboration, diversity of functions, and economic integration scored the lowest, with averages below 1.5 on a 4-point scale, while visual and environmental quality emerged as the only indicator with a consistently high score above 3.5. Most other indicators, such as accessibility and safety, remained below 2.5, indicating critical gaps in inclusivity, functionality, and user comfort. These deficiencies are attributed to limited budget allocations and weak inter-agency coordination, as confirmed through supporting interviews with local government officials. The results underscore the need for improved planning, maintenance, and inter-sectoral collaboration to ensure that public spaces can serve as inclusive, multifunctional, and environmentally responsible infrastructure that supports long-term tourism development. This study provides a replicable indicator-based assessment framework and highlights specific areas for policy intervention to enhance the role of public spaces in Sabang's sustainable tourism strategy.

Keywords: public space; sustainable tourism; Sabang City; tourism infrastructure; environmental awareness

Abstrak

Kota Sabang merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sekaligus *Port of Call* kapal pesiar di wilayah barat Indonesia, dengan potensi besar untuk mengembangkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, kondisi ruang publiknya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas ruang publik di Kota Sabang berdasarkan hasil observasi lapangan dengan menggunakan sepuluh indikator keberlanjutan yang disusun dari kajian literatur: aksesibilitas, keselamatan dan kenyamanan, kebersihan dan pemeliharaan, keindahan visual, keberagaman fungsi dan fasilitas, nilai sosial budaya, pola penggunaan pengunjung, integrasi ekonomi, kolaborasi pemangku kepentingan, dan wawasan lingkungan. Observasi dilakukan di tujuh lokasi ruang publik. Hasil menunjukkan bahwa indikator kolaborasi, keberagaman fungsi, dan integrasi ekonomi memperoleh skor terendah (rata-rata <1,5 dalam skala 4), sedangkan indikator kualitas visual dan lingkungan menjadi satu-satunya kategori dengan skor tinggi konsisten di atas 3,5. Sebagian besar indikator lainnya, termasuk aksesibilitas dan kenyamanan, berada di bawah skor 2,5, yang menunjukkan masih rendahnya inklusivitas dan fungsi ruang publik di Sabang. Keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi lintas sektor, sebagaimana dikonfirmasi melalui wawancara pendukung dengan instansi pemerintah daerah. Hasilnya penelitian ini menegaskan perlunya perencanaan, pemeliharaan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik agar ruang publik dapat berfungsi sebagai infrastruktur yang inklusif, multi fungsi dan bertanggung jawab secara lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata jangka panjang. Studi ini juga menawarkan kerangka evaluasi berbasis indikator yang dapat direplikasi, serta mengidentifikasi area strategis yang perlu menjadi fokus intervensi kebijakan untuk memperkuat peran ruang publik dalam strategi pariwisata berkelanjutan di Kota Sabang.

Kata Kunci: ruang publik; pariwisata berkelanjutan; Kota Sabang; infrastruktur pariwisata; kesadaran lingkungan

* Corresponding author

Received: September 12, 2025; Revised: October 02, 2025; Accepted: October 14, 2025

A. PENDAHULUAN

Kota Sabang, sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata Indonesia, terutama di wilayah barat. Selain menawarkan keindahan alam laut dan kekayaan budaya lokal, Sabang juga menjadi salah satu titik masuk utama kapal pesiar internasional, yang menjadikannya magnet wisatawan mancanegara. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya diimbangi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, khususnya ruang publik yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan, ruang publik tidak hanya dilihat sebagai elemen pelengkap, tetapi sebagai bagian penting dari sistem destinasi, yang dapat memperkuat konektivitas, pengalaman wisatawan, serta kualitas hidup masyarakat lokal (Carmona, 2019; Valdés Cano, 2022).

Secara konseptual, ruang publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki bersama, yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi (The Charter of Public Space). Dalam konteks perkotaan, ruang ini mencakup trotoar, taman, plaza, maupun fasilitas umum lainnya yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas ekonomi. Dalam pariwisata, ruang publik menjadi panggung budaya kota dan etalase identitas lokal (Campos, 2012; Mensch, 2007). Ruang publik yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan memiliki peran krusial dalam menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga inklusif, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan pengunjung dan warga kota (Das & Maitra, 2024).

Prinsip-prinsip desain ruang publik berkelanjutan mencakup inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, daya tarik visual, fleksibilitas fungsi, serta ketahanan terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Penerapan prinsip desain universal, seperti penyediaan *ramp*, *tactile paving*, dan *wayfinding*, memastikan bahwa ruang publik dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas (CEUD, 2016; ITDP Indonesia, 2020). Selain itu, keberadaan fitur seperti penerangan memadai, *bollard* sebagai pembatas kendaraan, serta fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan elemen hijau akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna (PRESTO, 2007; Distefano et al., 2023). Kenyamanan dan kemudahan akses bagi pejalan kaki merupakan komponen kunci dalam desain ruang publik yang mendukung kota berkelanjutan. Studi oleh Distefano et al. (2023) menegaskan bahwa preferensi berjalan kaki di ruang publik sangat dipengaruhi oleh kualitas jalur pedestrian yang tidak hanya aman dan ramah pengguna, tetapi juga menarik secara visual. Faktor-faktor ini sangat penting bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Temuan tersebut memperkuat relevansi penerapan prinsip *universal design* dalam pengembangan ruang publik, sebagaimana juga tercermin dalam hasil observasi di Kota Sabang, di mana ruang dengan jalur pedestrian yang inklusif cenderung lebih optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.

Konektivitas dan koherensi visual juga menjadi dimensi penting dalam desain ruang publik yang mendukung pariwisata. Jalur pedestrian yang terhubung dengan zona ekonomi, ruang budaya, atau kawasan wisata dapat meningkatkan mobilitas wisatawan dan memperkaya pengalaman kota (Mansouri & Ujang, 2016). Evaluasi infrastruktur pejalan kaki di destinasi wisata harus mempertimbangkan keterhubungan antar titik aktivitas wisata secara fungsional dan spasial. Das & Maitra (2024) mengidentifikasi bahwa intervensi pada fasilitas pedestrian—seperti penyediaan jalur ramah difabel, papan informasi, dan koneksi langsung ke zona wisata utama—berkontribusi signifikan dalam membentuk persepsi positif dan kenyamanan pengunjung. Hal ini sangat relevan dengan temuan di Kota Sabang, di mana ruang publik yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan alur wisata dan mobilitas warga, sehingga potensi ruang kota sebagai bagian dari sistem pariwisata masih belum optimal dimanfaatkan. Penguatan fungsi sosial dan ekonomi ruang publik juga penting untuk mendukung UMKM dan aktivitas budaya lokal, menjadikan ruang publik sebagai platform dinamis bagi pertumbuhan kota dan pemberdayaan masyarakat (Mensch, 2007; Sciortino et al., 2022). Dalam konteks Sabang, pendekatan

integratif ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap wisata alam dan membuka peluang diversifikasi destinasi berbasis ruang kota (Valdés Cano, 2022).

Pengembangan strategi ruang publik yang efektif memerlukan pendekatan yang berbasis pada karakter lokal dan potensi wilayah. Strategi berbasis kawasan (Barca et al., 2012) dan strategi berbasis sumber daya (Barney, 1991) mendorong pemanfaatan ruang publik sebagai aset unik kota yang dapat diolah menjadi daya tarik wisata alternatif. Selain itu, teori perencanaan kolaboratif (Healey, 2003) dan strategi berbasis komunitas (Hall, 2008; Okazaki, 2008) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang publik agar strategi yang dihasilkan relevan dan berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembentukan kerangka strategi yang digunakan dalam penelitian ini.

Meskipun Sabang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, kondisi ruang publiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, belum tersedianya kerangka evaluasi kualitas ruang publik yang kontekstual dan sistematis di Kota Sabang. Evaluasi ruang publik sering kali hanya bersifat fisik dan visual, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta keterlibatan komunitas dalam pemanfaatan ruang. Padahal, dalam konteks pariwisata berkelanjutan, ruang publik harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan pengunjung masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Ketidakhadiran indikator evaluasi yang berbasis keberlanjutan telah menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan ruang publik sebagai infrastruktur pendukung pariwisata, sehingga diperlukan penelitian yang dapat menjawab kesenjangan tersebut (Valdés Cano, 2022; Das & Maitra, 2024; PRESTO, 2007).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, penelitian ini merumuskan 10 (sepuluh) indikator kualitas ruang publik yang disusun dari berbagai literatur :

No.	Indikator	Literatur Pendukung
1.	Aksesibilitas inklusif	(Carmona, 2019); (CEUD, 2016); (Das & Maitra, 2024); (ITDP, 2020); (Valdés Cano, 2022); (PRESTO, 2007); (Mensch, 2007); (Mandic et al., 2018b); (Hennessy & Ai, 2023)
2.	Keselamatan dan kenyamanan	(Distefano et al., 2023); (PRESTO, 2007); (Mansouri & Ujang, 2016); (Valdés Cano, 2022b); (Carmona, 2019); PRESTO (2007); (Le Pira et al., 2021); (Das & Maitra, 2024); (Gath-Morad et al., 2023)
3.	Kebersihan dan pemeliharaan	(Valdés Cano, 2022); (Carmona, 2019); (PRESTO, 2007); (Le Pira et al., 2021); (Moreira, 2021)
4.	Keindahan visual	(Valdés Cano, 2022); (Carmona, 2019); (Hassanshahi et al., 2023); (PRESTO, 2007); (Wang et al., 2011); (Grilli et al., 2021); (Mansouri & Ujang, 2016)
5.	Keberagaman fungsi	(Valdés Cano, 2022); (Carmona, 2019); (PRESTO, 2007); (Mensch, 2007); (Mandic et al., 2018)
6.	Ekspresi sosial budaya	(Carmona, 2019); (Alizadeh et al., 2024); (Moreira, 2021); (Mansouri & Ujang, 2016)
7.	Pola penggunaan pengunjung	(Gath-Morad et al., 2023); (Das & Maitra (2024); (Sciortino et al., 2022b); (Toger et al., 2023); (Mansouri & Ujang, 2016)
8.	Integrasi ekonomi	(Mensch, 2007); (Sciortino et al. 2022); (Soni & Soni, 2016) (Volker & Handy, 2021); (Hoarau-Heemstra et al., 2023)
9.	Kolaborasi	(Carmona, 2019); (Valdes Cano, 2022); (Dimitrovski et al.,

2021); (Papathanassis, 2020); (Hoarau-Heemstra et al., 2023)
10. Berwawasan lingkungan (PRESTO, 2007); (Carmona, 2019); (Boluk et al., 2019); (Perdue, 2019); (Grilli et al., 2021); (Valdés Cano, 2022)

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas ruang publik di Kota Sabang sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pariwisata berkelanjutan. Penilaian dilakukan melalui observasi lapangan dengan menggunakan 10 indikator keberlanjutan yang disusun dari tinjauan literatur. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan ruang publik yang lebih inklusif, fungsional dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menilai kualitas ruang publik di Kota Sabang berdasarkan observasi lapangan dan didukung hasil wawancara dengan pemerintah dan tokoh masyarakat di Kota Sabang. Observasi dan wawancara dilakukan pada bulan Desember 2024. terdapat tujuh lokasi ruang publik yang berada di kawasan pusat Kota Sabang, yaitu; kawasan jalur pedestrian Pasiran, kawasan Teluk Sabang, Taman Segitiga, Taman Ria, kawasan taman depan kantor Walikota, Taman Burung dan kawasan Sabang Fair.

Setiap indikator dijabarkan ke dalam 3 hingga 5 pertanyaan kriteria dengan sistem penilaian berbasis skala 1 (buruk) hingga 4 (baik), tergantung pada persentase ketersediaan fitur di setiap lokasi. Pengumpulan data dilakukan melalui inspeksi visual, pengambilan foto, dan pencatatan langsung atas keberadaan atau ketiadaan masing-masing kriteria. Format penilaian lengkap dapat dilihat pada Tabel I. Nilai total per lokasi dihitung dengan menjumlahkan skor setiap indikator dan dinormalisasi ke dalam skala 4. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan performa antar lokasi serta mengidentifikasi indikator dengan skor tertinggi dan terendah untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Tabel I. Format Formulir Observasi

No.	Pertanyaan (Indikator)	Jawaban	Rating
(1)	(2)	(3)	(4)
A Aksesibilitas			
1	Akses bebas dari hambatan - seperti jalur tidak rusak, tidak terputus, dan tidak ada rintangan lainnya (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Tersedia fasilitas bagi difabel - Seperti <i>tactile paving, ramp, railing</i> (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	
3	Luasan jalur pejalan kaki cukup - minimal 1,2 m untuk kawasan permukiman dan 1,5 m untuk kawasan perkotaan, berdasarkan SNI. (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Tersedia <i>signage</i> - berupa papan nama, informasi atau penunjuk arah. (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u>			
Persentase yang diperoleh dijumlahkan untuk menemukan rating. 25% memenuhi = 1; 50% memenuhi = 2; 75% memenuhi = 3; 100% memenuhi = 4			
B Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan			

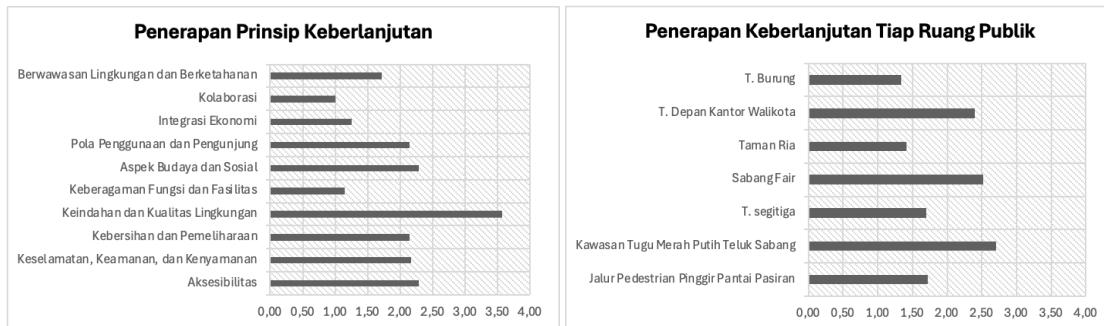
No.	Pertanyaan (Indikator)	Jawaban	Rating
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia sistem keamanan - seperti petugas keamanan atau alat pengawas keamanan. (bobot = 20%)	(Ya/ Tidak)	
2	Tersedia pencahayaan dan berfungsi pada malam hari. (bobot = 20%)	(Ya/ Tidak)	
3	Tersedia tempat atau petunjuk untuk evakuasi bencana - seperti tempat berkumpul ketika gempa bumi dan kebakaran, petunjuk evakuasi bencana tsunami, banjir dan lain sebagainya. (bobot = 20%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Tersedia tempat beristirahat atau berteduh dari panas dan hujan - seperti bangku taman, area piknik atau lesehan, gazebo dan peneduhan baik alami maupun buatan. (bobot = 20%)	(Ya/ Tidak)	
5	Tersedia Fasilitas toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. (bobot = 20%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u>			
20% memenuhi = 0,8; 40% memenuhi = 1; 60% memenuhi = 2,4; 80% memenuhi = 3,2; 100% memenuhi = 4			
C Kebersihan dan Pemeliharaan			
1	Adanya petugas kebersihan secara rutin (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Tersedia tempat sampah. (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	
3	Semua fasilitas berfungsi sebagai mana fungsinya. (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Tersedia himbauan menjaga kebersihan atau pemeliharaan ruang publik - baik lisan maupun tulisan. (bobot = 25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u>			
25% memenuhi = 1 50% memenuhi = 2 75% memenuhi = 3 100% memenuhi= 4			
D Keindahan dan Kualitas Lingkungan			
1	Terdapat ruang hijau seperti taman. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Terdapat pemandangannya - seperti laut, danau, kolam dll. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
3	Terdapat elemen Arsitektural atau dekoratif - seperti bangunan yang sengaja dibangun sebagai objek keindahan atau dekorasi pada fisik/desain ruang publik. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Ruang publik berada di lingkungan yang tenang dan lalu lintas yang ringan hingga sedang. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u>			
25% memenuhi = 1 50% memenuhi = 2 75% memenuhi = 3 100% memenuhi = 4			
E Keberagaman Fungsi dan Fasilitas			

No.	Pertanyaan (Indikator)	Jawaban	Rating
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia fasilitas pendukung pariwisata - seperti tempat berfoto, pusat informasi pariwisata, gerai makanan dan minuman, penyewaan sepeda wisata. (bobot=20%)	(Ya/ Tidak)	
2	Tersedia tempat untuk acara-acara kebudayaan, sosial dan pariwisata - seperti panggung, tribun, plaza yang luas untuk tenan. (bobot=20%)	(Ya/ Tidak)	
3	Tersedia sarana olahraga dan kebugaran - seperti peralatan kebugaran <i>outdoor</i> untuk kalistenik atau <i>gym</i> terbuka, jalur <i>jogging</i> dan sepeda, lapangan multifungsi. (bobot=20%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Tersedia fasilitas bermain anak. (bobot=20%)	(Ya/ Tidak)	
5	Tersedia fasilitas penunjang - seperti Wi-Fi gratis, stasiun pengisian daya, stasiun air minum gratis. (bobot=20%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u> 20% memenuhi = 0,8 40% memenuhi = 1,6 60% memenuhi = 2,4 80% memenuhi = 3,2 100% memenuhi = 4			
F Aspek Budaya dan Sosial			
1	Terdapat elemen edukasi budaya dan warisan lokal - seperti bangunan berarsitektur lokal, patung atau monumen budaya, papan informasi dan mural edukatif dan tempat untuk kegiatan seni budaya. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Tersedia tempat untuk kegiatan sosial - seperti plaza multifungsi, paviliun dan area duduk kolektif. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
3	Terselenggara kegiatan sosial-budaya - seperti <i>workshop</i> tradisional, festival atau pasar budaya dan komunitas relawan. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Tersedia fasilitas pendukung kegiatan spiritual dan reflektif - seperti area hening atau meditasi, fasilitas ibadah seperti mushola, elemen relaksasi seperti kolam kecil, air mancur atau taman hijau. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u> 25% memenuhi = 1 50% memenuhi = 2 75% memenuhi = 3 100% memenuhi = 4			
G Pola Penggunaan (waktu, pengguna dan aktivitas)			
1	Selalu dikunjungi sepanjang waktu - tidak termasuk tengah malam, beberapa daerah di Indonesia memiliki jam malam. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Pengunjung berasal dari berbagai kelompok usia. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
3	Memiliki daya tarik atau kecenderungan aktivitas tertentu - seperti melihat burung, berolah raga, kuliner dan sebagainya. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Tersedia program kegiatan reguler yang melibatkan masyarakat. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u> 25% tersedia = 1 50% tersedia = 2 75% tersedia = 3 100% tersedia = 4			

No.	Pertanyaan (Indikator)	Jawaban	Rating
(1)	(2)	(3)	(4)
H Integrasi Ekonomi			
1	Tersedia ruang khusus untuk berjualan, penyewaan, bazar seni, pameran atau <i>event</i> ekonomi kreatif. (bobot=30%)	(Ya/ Tidak)	
2	Tersedia koneksi ruang publik dengan pusat-pusat ekonomi - seperti trotoar, zebra cross, jembatan penyebrangan atau jalur khusus lainnya. (bobot=40%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
3	Adanya retribusi atau donasi untuk keberlanjutan ruang publik - seperti biaya parkir atau pengelolaan pendapatan dari aktivitas ekonomi di ruang publik. (bobot=30%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u> 30% memenuhi = 1,2 40% memenuhi = 1,6 60% memenuhi = 2,4 70% memenuhi = 2,8 100% memenuhi = 4			
I Kolaborasi			
1	Adanya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta - seperti adanya MoU, pendanaan dan sponsor kegiatan atau <i>event</i> di ruang publik. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal - seperti diskusi, program kebersihan, keamanan, penghijauan, pelatihan dan kegiatan rutin. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
3	Adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah - seperti program terpadu dan pengalokasian anggaran lintas lembaga. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
4	Adanya kolaborasi dengan akademisi - seperti pelibatan akademisi untuk memberikan kajian, penelitian, atau novasi dalam pengelolaan ruang publik. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u> 25% tersedia = 1 50% tersedia = 2 75% tersedia = 3 100% tersedia = 4			
J Berwawasan Lingkungan			
1	Terdapat sistem pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R atau pengelolaan limbah yang berkelanjutan. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
2	Terdapat upaya penghijauan yang terlihat dari adanya tanaman atau taman hijau yang terpelihara. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
3	Menggunakan energi terbarukan - seperti lampu LED dan tenaga surya untuk efisiensi energi. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	(1-4)
4	Menggunakan material ramah lingkungan - seperti kayu daur ulang, material lokal, material <i>permeable, paving</i> dari limbah plastik, baja tahan karat, dinding hijau. (bobot=25%)	(Ya/ Tidak)	
<u>Keterangan rating:</u> 25% tersedia = 1 50% tersedia = 2 75% tersedia = 3 100% tersedia = 4			

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Ketimpangan Antar Indikator Keberlanjutan



Gambar: Grafik Tingkat Penerapan Indikator Keberlanjutan

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Hasil observasi lapangan di tujuh ruang publik Kota Sabang pada Desember 2024 menunjukkan bahwa kualitas keberlanjutan ruang publik masih belum optimal. Rata-rata skor antar indikator berada dalam rentang 1,5 hingga 2,5 dari skala 4, kecuali indikator keindahan dan kualitas lingkungan yang mencatat nilai di atas 3,5. Sebaliknya, tiga indikator dengan performa terlemah adalah kolaborasi, keberagaman fungsi, dan integrasi ekonomi, yang seluruhnya memperoleh skor rata-rata di bawah 1,5. Tiga lokasi yang menunjukkan performa relatif baik adalah Taman Teluk Sabang, Sabang Fair, dan taman depan kantor Walikota. Permasalahan utama yang mendasari rendahnya performa ruang publik adalah keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan. Menurut Dinas PUPR, anggaran pemeliharaan hanya sekitar Rp250 juta per tahun, yang jauh dari mencukupi untuk pengelolaan tujuh ruang publik. Aspirasi pembangunan ruang publik pun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan sektor pariwisata, sebagaimana diungkapkan Dinas Pariwisata. Rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan—termasuk dinas teknis, pemerintah kota, dan swasta—memperburuk fragmentasi pengelolaan ruang.

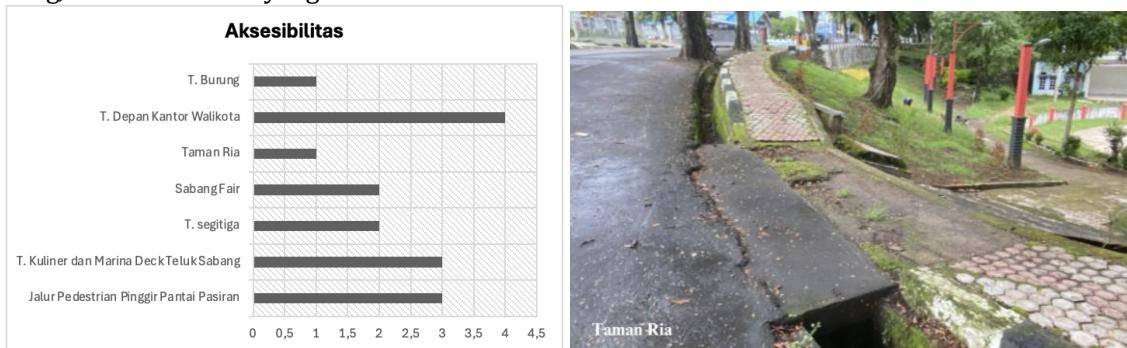
2. Perbandingan Indikator Keberlanjutan Tiap Lokasi Observasi

Perbandingan indikator keberlanjutan pada tiap lokasi observasi penting dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai variasi kualitas dan tantangan yang dihadapi masing-masing ruang publik. Analisis ini memungkinkan identifikasi kekuatan spesifik yang dapat dijadikan model replikasi, sekaligus mengungkap kelemahan yang memerlukan intervensi prioritas. Dengan memahami perbedaan capaian antar lokasi, pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran, baik melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi maupun inovasi desain berbasis konteks lokal. Pendekatan komparatif ini membantu mengukur sejauh mana prinsip-prinsip keberlanjutan telah diimplementasikan secara merata, sehingga upaya peningkatan dapat diarahkan secara efektif untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan di Kota Sabang.

a. Aksesibilitas

Tingkat aksesibilitas ruang publik di Sabang menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan adanya upaya pembangunan yang belum merata dan tantangan dalam merevitalisasi infrastruktur lama. Hasil observasi lapangan menunjukkan performa terendah pada Taman Burung dan Taman Ria (skor 1), yang disebabkan oleh minimnya fasilitas ramah disabilitas, jalur pedestrian yang sangat sempit, dan akses masuk yang tidak jelas. Sebaliknya, area seperti taman depan kantor Walikota dan Teluk Sabang

memperoleh skor lebih tinggi (3–4) berkat adanya jalur pedestrian yang lebih lebar, dilengkapi tactile paving, dan akses masuk yang lebih terbuka.



Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Aksesibilitas, (kanan) Taman Ria

Sumber: Hasil Observasi (2024)

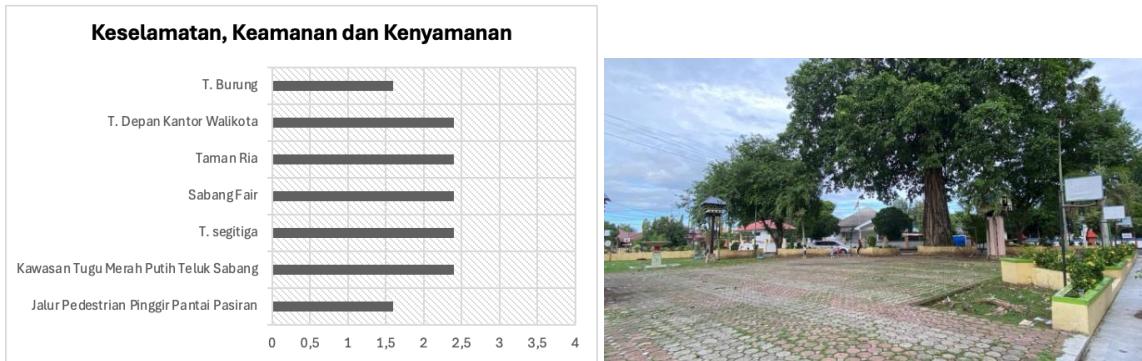
Temuan ini diperkuat oleh pernyataan melalui wawancara BAPPEDA (2024), yang mengonfirmasi bahwa konsep keberlanjutan telah diterapkan dalam beberapa proyek, salah satunya melalui penyediaan jalur pedestrian dengan tactile paving untuk penyandang tunanetra. Namun, BAPPEDA juga mengakui adanya keterbatasan besar: "untuk pengguna kursi roda, masih ada keterbatasan akses akibat ukuran jalur yang sempit." Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan, implementasinya belum sepenuhnya inklusif. Lebih jauh, BAPPEDA menyoroti pentingnya perencanaan yang responsif gender dan inklusif secara lebih luas, seperti penyediaan ruang menyusui dan bermain anak, sebagai target perbaikan di masa depan agar ruang publik ramah bagi semua kalangan.

Di sisi lain, lambatnya perbaikan di beberapa area strategis disebabkan oleh dua kendala utama: kewenangan birokrasi dan pengabaian aset historis. Wawancara dengan Dinas PUPR (wawancara 2024) menyoroti masalah yurisdiksi sebagai penghambat utama. "Contohnya, Jalan Perdagangan adalah jalan nasional, sehingga jika kami ingin memperbaikinya, harus ada izin dari Balai Jalan." Kendala birokrasi ini menjelaskan mengapa salah satu arteri komersial terpenting di kota sulit untuk ditingkatkan fasilitas pedestriannya. Sebaliknya, untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota seperti Jalan O Siropati, pihak PUPR menegaskan telah memiliki rencana rehabilitasi, "termasuk pembangunan jalur pedestrian dan trotoar," karena signifikansinya sebagai lokasi berbagai fasilitas publik penting. Selain kendala kewenangan, masalah kedua adalah pengabaian potensi aset lama, seperti yang diungkapkan oleh perwakilan Dinas Pariwisata (2024). Ia mencontohkan jalur pedestrian strategis dari zaman Belanda yang menghubungkan taman depan kantor Walikota dengan kawasan perdagangan. "Jalur ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda, namun sayangnya tidak pernah diperbarui," keluhnya. Akibatnya, akses vital yang seharusnya mengintegrasikan area perkantoran dengan pusat komersial menjadi tidak maksimal dan kehilangan daya tariknya karena desain yang usang.

Dengan demikian, tantangan aksesibilitas di Sabang bersifat multifaset: tidak hanya terletak pada pembangunan fasilitas baru yang belum sepenuhnya inklusif, tetapi juga terhambat oleh batasan kewenangan di jalan-jalan utama dan kegagalan merevitalisasi infrastruktur lama yang strategis.

b. Keselamatan dan Kenyamanan

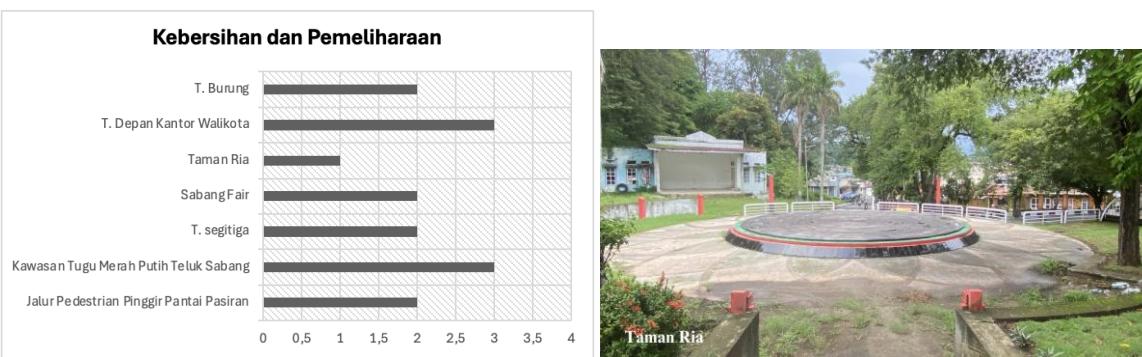
Taman Burung dan jalur pedestrian Pasiran mencatat skor terendah (1,5) karena tidak dilengkapi toilet umum, tempat duduk, penerangan malam, maupun sistem keamanan. Lokasi lain menunjukkan skor di atas 2, namun belum memenuhi kategori layak sepenuhnya. Ketiadaan fasilitas ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga membatasi ruang untuk aktivitas rekreasi masyarakat.



Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Keselamatan & Kenyamanan, (kanan) Taman Burung

Sumber: Hasil Observasi (2024)

c. Kebersihan dan Pemeliharaan



Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Kebersihan & Pemeliharaan, (kanan) Taman Ria

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Taman Ria merupakan lokasi dengan skor kebersihan terendah (skor 1). Observasi menemukan akumulasi sampah, fasilitas rusak, dan tidak adanya petugas kebersihan rutin. Sebaliknya, Teluk Sabang dantaman depan kantor Walikota memperoleh skor 3 karena adanya pemeliharaan yang lebih baik. Observasi juga mengidentifikasi kasus vandalisme, seperti pencopotan lampu taman, sebagai tantangan berulang yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran pengguna.

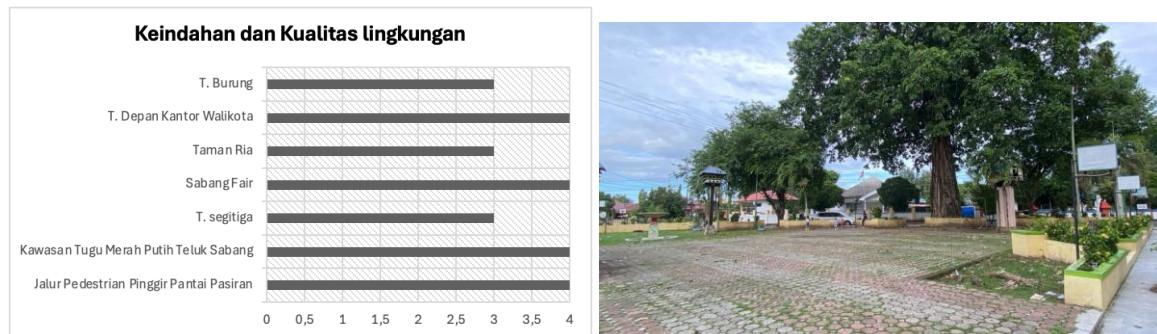
Masalah fasilitas ini diakui secara terbuka oleh BAPPEDA (wawancara 2024), yang mengonfirmasi bahwa fasilitas kebersihan di area vital seperti Sabang Fair (lokasi Taman Ria) memang tidak memadai. "Tong sampah yang dulunya disediakan oleh BPKS kini banyak yang rusak atau hilang," ujar perwakilan BAPPEDA. Mereka juga menyoroti bahwa ini adalah pola yang berulang, seperti di Pasiran, di mana tong sampah yang ada "belum diperbarui sejak dibangun pada Sail Sabang." Ini menunjukkan adanya siklus penyediaan fasilitas tanpa diiringi program pemeliharaan jangka panjang. Akar masalahnya ternyata lebih dalam dari sekadar fasilitas yang rusak atau kurang. Wawancara dengan BAPPEDA juga menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan observasi mengenai vandalisme diperkuat dengan contoh yang lebih ekstrem: "lampu taman yang baru dipasang sering dirusak, bahkan cermin lalu lintas dilempar hingga pecah." Perilaku ini, ditambah dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan meskipun tong sampah tersedia, menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur saja tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku.

Menjawab tantangan perilaku ini, Dinas Pariwisata (wawancara 2024) menawarkan solusi yang berfokus pada investasi sumber daya manusia. Menurut mereka, infrastruktur fisik harus diimbangi dengan "pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat." Mengambil Bali sebagai contoh sukses di

mana komunitas lokal menjadi garda terdepan pariwisata, Dinas Pariwisata mengusulkan program pelatihan sebagai fondasi. Mereka berpendapat, "Jika kita bisa mengadakan pelatihan untuk 100 orang, meskipun hanya 10 hingga 15 orang yang benar-benar berubah pikirannya, mereka bisa memberikan pengaruh positif kepada yang lain." Pendekatan ini dipandang sebagai investasi mendasar yang biayanya relatif kecil namun dampaknya sangat vital untuk keberlanjutan pariwisata dan kualitas ruang publik di Sabang.

d. Keindahan dan kualitas lingkungan

Indikator kualitas estetika dan visual mencatat nilai tertinggi di antara semua variabel yang diukur, dengan skor rata-rata di atas 3,5. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang publik di Sabang memiliki potensi alamiah yang inheren. Hampir seluruh ruang publik yang diobservasi menawarkan keunggulan visual berupa pemandangan langsung ke laut, didukung oleh kualitas udara yang bersih serta keberadaan vegetasi, terutama pohon-pohon berukuran besar yang menambah kenyamanan termal dan visual. Beberapa taman, karena lokasinya di tepi pantai atau pada kontur bertanah tinggi, memiliki potensi estetika yang signifikan.

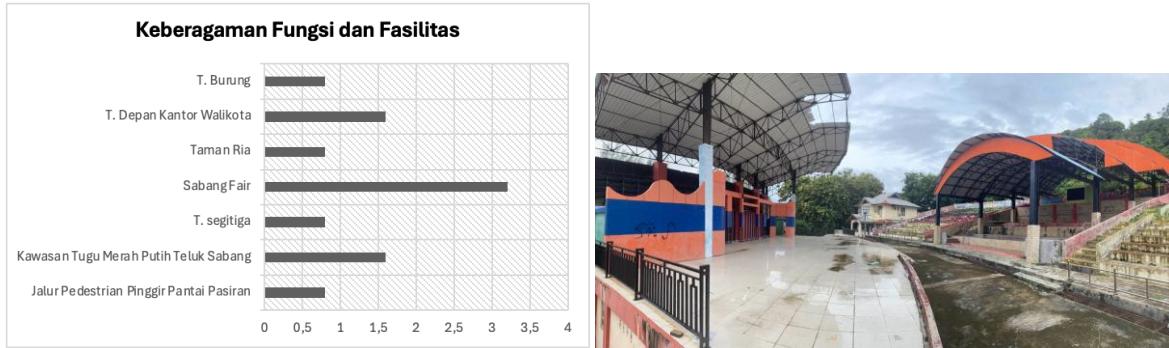


Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Keindahan & Kualitas Lingkungan, (kanan) Taman Burung

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Analisis ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pariwisata dan sejarah Kota Sabang, Albina Arrahman (wawancara 2024), mengatakan bahwa potensi ruang publik di Kota Sabang bernilai luar biasa dan kondisinya di atas rata-rata. Menurutnya, keunggulan ini disebabkan oleh letak yang strategis, kemudahan aksesibilitas melalui jalur transportasi utama, serta posisi dalam lanskap kota yang menyajikan pemandangan indah. Ia menambahkan bahwa banyak ruang publik berlokasi di titik-titik sentral kota dan memiliki daya tarik visual yang memikat. Meskipun demikian, observasi lapangan juga mengidentifikasi adanya kesenjangan, di mana keunggulan alamiah ini belum didukung secara optimal oleh intervensi perancangan lanskap. Elemen-elemen artifisial seperti ornamen kota, sistem pencahayaan artistik, ataupun elemen visual lain yang merepresentasikan tema local masih sangat minim. Potensi besar yang belum tergarap ini sesungguhnya dapat menjadi kekuatan utama Sabang dalam pengembangan pariwisata berbasis ruang kota apabila didukung oleh perencanaan lanskap yang lebih strategis dan terencana.

e. Keberagaman Fungsi dan Fasilitas



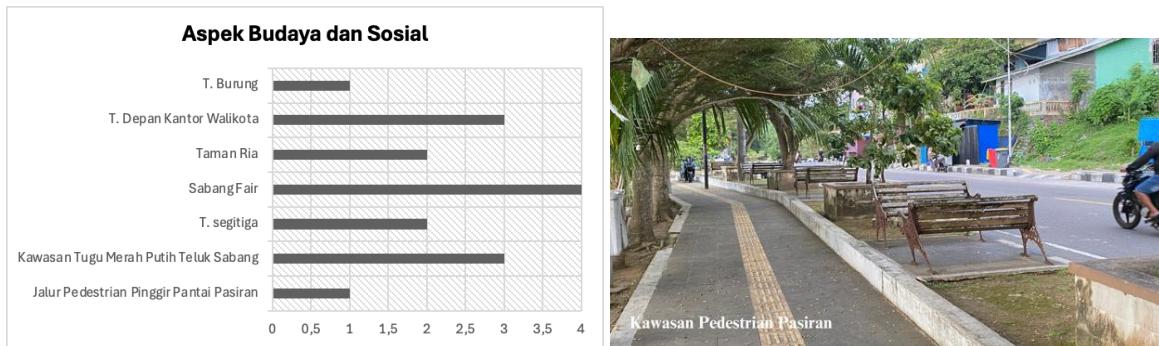
Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Keberagaman Fungsi & Fasilitas, (kanan) Panggung Pertunjukan Sabang Fair

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Hanya Sabang Fair yang menunjukkan keberagaman fungsi yang baik (skor 3) karena dilengkapi dengan panggung, tribun, dan dimanfaatkan untuk kegiatan budaya maupun hiburan. Fasilitas di lokasi ini juga relatif memadai, termasuk ketersediaan listrik yang mendukung pelaksanaan acara publik. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh BAPPEDA (2024), Sabang Fair belum memiliki akses Wi-Fi, yang di banyak kota lain telah menjadi layanan standar di ruang publik. Rencana pengembangan ke depan mencakup pembangunan taman bermain anak di beberapa sudut area ini pada tahun 2025 untuk menggantikan fasilitas bermain yang sudah tidak layak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan nyaman saat berlangsung acara publik.

Selain Sabang Fair, beberapa ruang publik lain di Sabang memang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, namun intensitas dan variasinya terbatas. Taman Tugu Merah Putih, misalnya, sering digunakan untuk kegiatan tahunan seperti Sabang Marine Festival yang dipimpin oleh BPKS, dengan Pemerintah Kota Sabang berperan sebagai pendukung pelaksanaan (BAPPEDA, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar ruang publik lainnya, seperti Taman Burung, Taman Ria, dan Taman Segitiga, hanya berfungsi sebagai jalur lalu lintas atau area terbuka tanpa fungsi tambahan yang signifikan, sehingga memperoleh skor di bawah 1,5 dalam indikator keberagaman fungsi. Keterbatasan ini sejalan dengan pernyataan pelaku lokal (Albina, 2024) bahwa sebagian besar ruang publik di Sabang terbentuk secara reaktif dari sirkulasi kota dan bukan hasil perencanaan fungsional yang matang. Inovasi desain dan ide-ide kreatif dalam pengembangan ruang publik masih minim, dengan hanya sedikit lokasi—seperti Sabang Fair—yang sejak awal dirancang untuk memiliki fungsi sosial, budaya, dan ekonomi yang terintegrasi. Kondisi ini membatasi potensi ruang publik sebagai pusat interaksi, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

f. Ekspresi Sosial Budaya



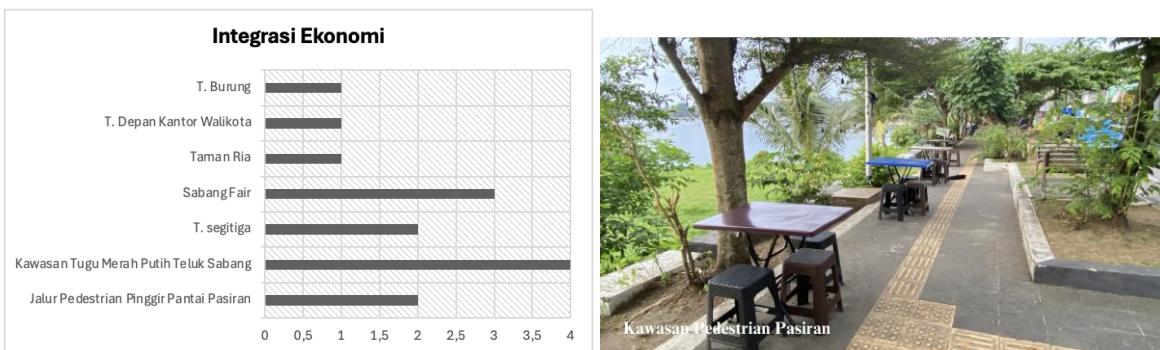
Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Ekspresi Sosial Budaya, (kanan) Jalur Pedestrian Pasiran

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Sebagian besar ruang publik di Sabang belum difungsikan secara konsisten sebagai wadah ekspresi sosial dan budaya. Berdasarkan observasi lapangan, hanya Sabang Fair yang secara rutin dimanfaatkan untuk penyelenggaraan event budaya seperti pentas seni dan kegiatan peringatan hari besar. Lokasi lain, seperti Taman Burung, tidak menunjukkan pemanfaatan signifikan untuk aktivitas budaya baik secara formal maupun informal. Ketiadaan sarana pendukung seperti panggung terbuka, mural budaya, atau ruang kreatif menjadi salah satu faktor yang membatasi peran ruang publik dalam memperkuat identitas lokal. Nilai rata-rata indikator pemanfaatan sosial-budaya berada pada kisaran 1,5 hingga 2, yang menunjukkan bahwa potensi ini belum tergarap secara optimal.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan BAPPEDA Kota Sabang menunjukkan bahwa Taman Ria pernah menjadi lokasi penyelenggaraan acara seni dan pentas budaya, termasuk Festival Kuah Beulangong dan penyambutan tamu kapal pesiar. Namun, frekuensi kegiatan tersebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat keterbatasan anggaran. Kegiatan yang tersisa cenderung bersifat insidental dan tidak memiliki jadwal yang berkesinambungan. Kondisi ini memperkuat temuan observasi bahwa keberlanjutan agenda dan ketersediaan infrastruktur pendukung menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan fungsi sosial-budaya ruang publik di Sabang.

g. Integrasi Ekonomi



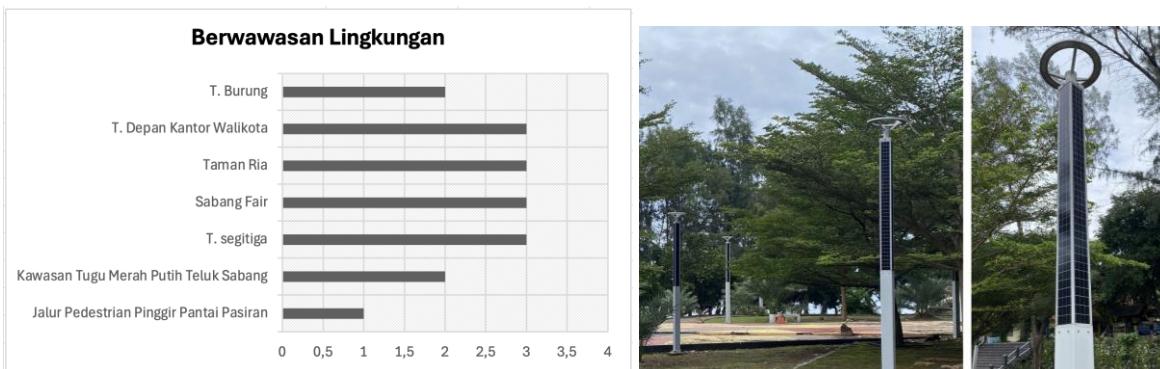
Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Integrasi Ekonomi, (kanan) Jalur Pedestrian Pasiran

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Observasi lapangan menunjukkan bahwa Teluk Sabang meraih skor tertinggi (4) karena terintegrasi langsung dengan zona kuliner, yang menciptakan sinergi antara ruang publik dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ruang publik lain di Sabang, seperti Sabang Fair, belum menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Albina Arrahman (2024), yang menyatakan bahwa ruang publik di Sabang belum dimanfaatkan secara optimal. Ruang-ruang publik ini, seperti Sabang Fair, cenderung hanya digunakan untuk aktivitas pasif seperti duduk-duduk tanpa dukungan fasilitas yang memadai untuk menarik pengunjung agar berinteraksi lebih lama.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya durasi kunjungan dan potensi perputaran ekonomi lokal. Wawancara dengan Albina (2024) menguatkan temuan ini, dengan penekanan bahwa pedagang di Sabang Fair hanya berjualan pada sore hari dan berhenti menjelang malam, menunjukkan minimnya insentif bagi pengunjung untuk tinggal lebih lama. Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi ruang publik melalui penambahan fasilitas yang menarik dapat meningkatkan durasi kunjungan. Jika hal ini terjadi, dampaknya terhadap ekonomi lokal akan signifikan, karena dapat Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi, seiring dengan meningkatnya waktu yang dihabiskan pengunjung untuk menikmati fasilitas yang tersedia.

h. Berwawasan Lingkungan



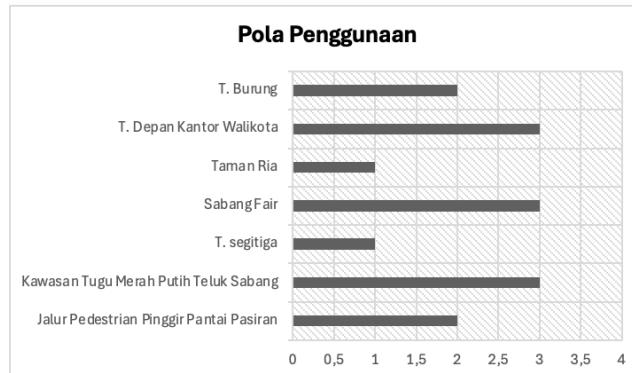
Gambar: (kiri) Grafik Tingkat Berwawasan Lingkungan, (kanan) lampu Solar Cell di Sabang Fair

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Penerapan energi ramah lingkungan pada ruang publik di Sabang merefleksikan adanya inisiatif awal yang menghadapi kendala keberlanjutan signifikan, sehingga mencatatkan nilai rata-rata indikator pada rentang 2,0–2,5. Observasi lapangan mengidentifikasi adanya implementasi awal berupa pemasangan lampu bertenaga surya di beberapa titik, seperti Taman Burung dan Taman Teluk Sabang. Namun, sebagian besar fasilitas tersebut ditemukan dalam kondisi tidak berfungsi akibat kerusakan teknis dan ketidadaan program pemeliharaan yang efektif.

Temuan ini diperjelas secara faktual oleh hasil wawancara dengan dinas PUPR (2024), yang mengonfirmasi bahwa penggunaan lampu panel surya telah dihentikan. Keputusan ini didasarkan pada serangkaian kendala operasional yang kompleks. Menurut PUPR, teknologi ini memiliki siklus hidup yang pendek ("sering rusak setelah 3-4 tahun"), rentan terhadap faktor sosial seperti pencurian komponen baterai, serta mengalami gangguan dari fauna lokal seperti monyet. Akibat dari tantangan teknis, sosial, dan lingkungan tersebut, terjadi sebuah regresi ke sistem konvensional. Pihak PUPR menyatakan, "Saat ini, kami menggunakan lampu jaringan listrik yang lebih andal dan mudah dikelola." Kebijakan ini mengindikasikan bahwa inisiatif energi terbarukan yang pernah ada gagal bertransformasi menjadi sistem yang berkelanjutan karena tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lokal yang spesifik. Kegagalan ini, ditambah dengan belum tersedianya program atau fitur edukatif seperti papan informasi lingkungan atau elemen naturalisasi (misalnya bio-swale), menegaskan bahwa aspek ekologis dalam perencanaan ruang publik belum menjadi prioritas yang terintegrasi.

i. Pola Penggunaan



Gambar: Grafik Tingkat Pola Penggunaan

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Berdasarkan hasil observasi, pola penggunaan ruang publik di Sabang menunjukkan sifat yang terbatas dan temporer. Ruang-ruang publik ini, seperti yang diamati, umumnya hanya ramai pada waktu-waktu tertentu, yaitu sore hari atau akhir pekan, dengan dominasi aktivitas pasif seperti duduk-duduk, bermain anak, dan berjalan santai. Kondisi ini menyebabkan ruang-ruang tersebut belum mampu mengakomodasi beragam aktivitas yang dapat memicu interaksi lintas kelompok sosial atau usia. Indikator ini mencatatkan nilai rata-rata 1,5–2,0, yang menunjukkan rendahnya dinamika penggunaan.

Namun, temuan ini dielaborasi oleh hasil wawancara dengan Albina (2024) selaku salah satu tokoh masyarakat, yang menyoroti adanya inisiatif dari komunitas lokal. Inisiatif tersebut mencakup pemanfaatan area di depan kantor Walikota sebagai titik kumpul dan tempat istirahat bagi petugas kebersihan, serta pengembangan taman digital yang menyediakan fasilitas Wi-Fi sebagai daya tarik bagi anak-anak. Meskipun demikian, ia juga menegaskan bahwa pemanfaatan ruang publik sering kali terbatas pada acara atau event temporer dan belum terintegrasi sebagai ruang yang dapat dinikmati secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep yang lebih inovatif untuk mengubah ruang-ruang publik menjadi area yang aktif dan menarik secara terus-menerus. Dengan demikian, meskipun ada inisiatif komunitas, pemanfaatan ruang publik secara keseluruhan masih memerlukan strategi yang lebih terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan interaksi dan dinamika penggunaan.

j. Kolaborasi

Seluruh lokasi mencatat skor kolaborasi 1, mencerminkan tidak adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Proses koordinasi antar dinas masih terbatas, sementara kerja sama dengan sektor swasta terkendala mekanisme CSR yang birokratis. Selain itu, pembagian kewenangan aset antara BPKS dan Pemerintah Kota juga mempersulit pengelolaan ruang publik.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan ruang publik di Sabang masih minim, tercermin dari skor kolaborasi yang hanya mencapai 1. Wawancara dengan BAPPEDA (2024) menguatkan temuan ini, terutama terkait kendala koordinasi. Meskipun koordinasi dengan dinas di bawah Pemerintah Kota berjalan lancar, kerja sama dengan BPKS terkendala karena keterbatasan anggaran dan tidak jelas tanggung jawab aset, seperti pada kasus Sabang Fair. Di sisi lain, hasil wawancara dengan Albina (2024) menjelaskan adanya partisipasi masyarakat dan komunitas dalam program pengembangan dan sosialisasi, menunjukkan adanya kolaborasi dengan masyarakat meskipun belum terstruktur secara optimal.

D. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas ruang publik di Kota Sabang sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pariwisata berkelanjutan, menggunakan pendekatan observasi lapangan berdasarkan sepuluh indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ruang publik di Sabang belum memenuhi standar keberlanjutan secara menyeluruh. Dari sepuluh indikator yang dinilai, hanya keindahan visual dan kualitas lingkungan yang menonjol, dengan skor rata-rata >3,5, sementara kolaborasi pemangku kepentingan, keberagaman fungsi, dan integrasi ekonomi menjadi indikator dengan skor terendah (<1,5).

Ruang publik di Sabang belum sepenuhnya dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan yang holistik. Kelemahan terlihat tidak hanya dari sisi fisik seperti aksesibilitas dan kenyamanan, tetapi juga pada aspek kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Ketiadaan fasilitas inklusif, terbatasnya penggunaan ruang untuk ekspresi budaya, minimnya aktivitas ekonomi, serta lemahnya kolaborasi antar pihak menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam merancang dan mengelola ruang publik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa indikator keberlanjutan dapat menjadi alat ukur yang efektif untuk menilai dan merumuskan strategi peningkatan kualitas ruang publik secara kontekstual.

Sintesis Temuan Kunci

Berdasarkan observasi dan analisis terhadap sepuluh indikator keberlanjutan, berikut adalah temuan utama yang dapat disintesis:

- 1) Keterbatasan anggaran menjadi akar persoalan utama yang mempengaruhi hampir semua indikator, terutama pemeliharaan dan pengadaan fasilitas pendukung.
- 2) Kolaborasi lintas sektor sangat lemah, baik antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat dan sektor swasta.
- 3) Ruang publik banyak terbentuk secara reaktif tanpa desain strategis yang memperhitungkan fungsi sosial, ekonomi, dan budaya secara terpadu.
- 4) Potensi alam Sabang (visual dan kualitas lingkungan) sangat tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pengalaman wisatawan.
- 5) Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang publik masih rendah, tercermin dari vandalisme, kurangnya partisipasi, dan kebersihan yang tidak terjaga.
- 6) Fungsi ruang publik belum mendukung aktivitas pariwisata.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait:

- 1) Mengembangkan perencanaan ruang publik berbasis indikator keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara proporsional.
- 2) Meningkatkan kolaborasi lintas sektor melalui forum koordinasi antar instansi, penguatan kelembagaan lintas kewenangan, serta pembukaan ruang partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
- 3) Meningkatkan alokasi anggaran dan efisiensi program, dengan memprioritaskan ruang publik yang strategis secara visual dan aktivitas wisata.
- 4) Mendorong revitalisasi fungsi ruang publik dengan pendekatan berbasis komunitas, misalnya melalui pelibatan seniman lokal, UMKM, serta komunitas anak muda.
- 5) Memperbaiki sistem pemeliharaan ruang publik secara rutin, termasuk peningkatan Kesadaran masyarakat melalui edukasi, *signage*, dan keterlibatan komunitas dalam menjaga fasilitas umum.
- 6) Mengembangkan program monitoring dan evaluasi berbasis data secara berkala menggunakan kerangka indikator yang telah dibuktikan dalam studi ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alizadeh, H., Bork-Hüffer, T., Kohlbacher, J., Mohammed-Amin, R. K., & Naimi, K. (2024). The contribution of urban public space to the social interactions and empowerment of women. *Journal of Urban Affairs*, 46(4). <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2095915>
- Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1). <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Boluk, K. A., Cavalieri, C. T., & Higgins-Desbiolles, F. (2019). A critical framework for interrogating the United Nations Sustainable Development Goals 2030 Agenda in tourism. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 27, Issue 7). <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1619748>

- Campos, B. (2012). Jan Gehl (2010), Cities for People. *The Journal of Space Syntax (JOSS)*, 3(1).
- Carmona, M. (2019). Principles for public space design, planning to do better. *Urban Design International*, 24(1). <https://doi.org/10.1057/s41289-018-0070-3>
- CEUD. (2016). The 7 Principles. *Centre for Excellence in Universal Design*.
- Das, P., & Maitra, S. (2024). Priority areas of intervention for improving pedestrian infrastructure and facilities at tourist destinations in India. *Transport Policy*, 145(October 2023), 126–136. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.10.018>
- Dimitrovski, D., Lemmetyinen, A., Nieminen, L., & Pohjola, T. (2021). Understanding coastal and marine tourism sustainability - A multi-stakeholder analysis. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100554>
- Distefano, N., Leonardi, S., & Liotta, N. G. (2023). Walking for Sustainable Cities: Factors Affecting Users' Willingness to Walk. *Sustainability (Switzerland)*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/su15075684>
- Gath-Morad, M., O. Plaut, P., & Kalay, Y. E. (2023). Attract or repel: how street features shape pedestrians' leisure walks in cities. *Journal of Urban Design*, 00(00), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13574809.2023.2237468>
- Grilli, G., Tyllianakis, E., Luisetti, T., Ferrini, S., & Turner, R. K. (2021). Prospective tourist preferences for sustainable tourism development in Small Island Developing States. *Tourism Management*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104178>
- Hall, C. M. (2008). Tourism Planning. Policies, Process and Relationships. In *Annals of Tourism Research*.
- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in perspective. *Planning Theory*, 2(2). <https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Hoarau-Heemstra, H., Wigger, K., Olsen, J., & James, L. (2023). Cruise tourism destinations: Practices, consequences and the road to sustainability. *Journal of Destination Marketing and Management*, 30(February), 100820. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2023.100820>
- ITDP Indonesia. (2020). *National Vision of Non-Motorized Transport Infrastructure*. 1–87.
- Le Pira, M., Marcucci, E., & Gatta, V. (2021). Roman holiday: Tourist heterogeneous preferences for walking path elements. *Research in Transportation Economics*, 90(July), 101106. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2021.101106>
- Mandic, A., Mrnjavac, Ž., & Kordic, L. (2018). Tourism infrastructure, recreational facilities and tourism development. *Tourism and Hospitality Management*, 24(1), 41–62. <https://doi.org/10.20867/thm.24.1.12>
- Mansouri, M., & Ujang, N. (2016). Tourist' expectation and satisfaction towards pedestrian networks in the historical district of Kuala Lumpur, Malaysia. *Asian Geographer*, 33(1), 35–55. <https://doi.org/10.1080/10225706.2016.1185639>
- Mensch, J. (2007). Public space. *Continental Philosophy Review*, 40(1), 31–47. <https://doi.org/10.1007/s11007-006-9038-x>
- Moreira, S. (2021). *No Title*. What Is Placemaking? <https://www.archdaily.com/961333/what-is-placemaking>
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 16, Issue 5). <https://doi.org/10.2167/jost782.0>
- Papathanassis, A. (2020). The growth and development of the cruise sector: a perspective article. In *Tourism Review* (Vol. 75, Issue 1). <https://doi.org/10.1108/TR-02-2019-0037>

- Sciortino, C., Ferrante, M., De Cantis, S., & Gyimóthy, S. (2022a). Tracking cruise passengers' consumption: An analysis of the relationships between onshore mobility and expenditure. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(2). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100059>
- Sciortino, C., Ferrante, M., De Cantis, S., & Gyimóthy, S. (2022b). Tracking cruise passengers' consumption: An analysis of the relationships between onshore mobility and expenditure. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(2). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100059>
- Soni, N., & Soni, N. (2016). Benefits of pedestrianization and warrants to pedestrianize an area. *Land Use Policy*, 57(5), 139–150. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.05.009>
- Toger, M., Östh, J., & Persson, S. G. (2023). What You See is Where You Go: Cruise Tourists' Spatial Consumption of Destination Amenities. *Economic Themes*, 61(1), 63–84. <https://doi.org/10.2478/ethemes-2023-0004>
- Valdés Cano, L. (2022). *Rethinking public space for a sustainable metropolitan future metropolitan comparative studies*. www.bernatfont.com
- Volker, J. M. B., & Handy, S. (2021). Economic impacts on local businesses of investments in bicycle and pedestrian infrastructure: a review of the evidence. *Transport Reviews*, 41(4). <https://doi.org/10.1080/01441647.2021.1912849>
- Wang, F., Zhang, R., Dong, S., & Liang, L. (2011). Urban planning and design of pedestrian space from perspectives of fitness. *Procedia Engineering*, 21, 363–367. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2027>